

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Atau Sumber Lainnya

- Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Jurnal Pemikiran*, 210(2), 31-44. <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>
- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17(1), 21-39. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/807>
- Bareta, R. D., Dwiyantoro, Y., & Adhiputranto, P. (2020). Kajian Pengenaan Biaya Dalam Penggunaan Barang Milik Negara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 95-115. <https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.345>
- Daniati, L., & Farida, L. (2013). Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(3). <https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/1376>
- Hamdi. (2015). Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 500-533. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.734>
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15-30. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519>
- Januar, I. R., Widiati, I. A., & Suryani, L. P. (2020). Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 52-56. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2434.52-56>
- Lamangida, T., & Harun, N. (2021). Manajemen Aset Bergerak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo. *Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 66-76. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/article/view/1303>
- Lanud Adi Soemarmo. (2019). *Lanud Adi Soemarmo Kawah Candradimuka Prajurit TNI AU*
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1-14. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190>

Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Jurnal Of Public Policy and Management Review*, 11(1).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32906>

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138-150.
<https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15674>

Soegijono. (1993). Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Media Litbangkes*, III(1), 17-21.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara*

Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Aset Tetap*

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas*.

Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/Pmk.06/2014. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara*.

- Kementerian Pertahanan. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara Stan Nomor Per-9/Pkn/2020. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Mahasiswa*.